

***SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS AND CULTURAL COMMUNITIES
AROUND THE AREA PT. ADINDO Hutani MANAGEMENT IN THE
DISTRICT AND DISTRICT NUNUKAN TANA Tidung PROVINCE East
Kalimantan***

Warman

(Lecturer Department of Guidance and Counseling-Unmul IPS)

ABSTRACT

Plans for utilization of timber in natural forest area of 191,487 ha by PT. Adindo Hutani Lestari in Tana Tidung and Nunukan of East Kalimantan province besides a positive impact also negatively impact the socio-economic and cultural conditions of the surrounding community. Of The results show that the average level of household income per capita per year is good enough or are not classified as poor. In general they are farming, fishing, gardening, and only a small portion has a second job. Land area in controlled an average of 2 hectares per household obtained from parental inheritance, opening the forest itself, and some who do not own land, because they even have a family as head of the family, but they still ride in the elderly. The type and non-formal economic activity in general is quite varied, such as stalls / kiosks, food stalls / taverns, and KUD / KSP. Economic infrastructure is still inadequate.

Applicable customs are indigenous Dayak. The role of traditional leaders is dominant in resolving issues related to customary law. The things that a ban has been arranged with the council, for example, prohibited liquor, intimate relationships before marriage. Social conflicts are rare, and the source of the cause of young people is a problem and can be solved by way of deliberation / familiarity. The process of assimilation has occurred between them. Existing social institutions and functioning properly include RT, Institute of Traditional, village councils, and religious institutions. Public perception of the plan for utilization of timber in natural forests by PT. Adindo Hutani Lestari very positive. People consider that the presence of PT. Adindo Hutani Lestari will benefit them.

Keywords: Socioeconomic; Social Culture.

Warman is Lecturer FKIP Univ. Mulawarman Samarinda.

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Otonomi Daerah 1999).

Hutan produksi di Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dimanfaatkan secara arif, dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup untuk kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang.

PT. Adindo Hutani Lestari adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kehutanan memiliki areal seluas 191.487 Ha, yang telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL, dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Komite Pusat Amdal Dephut Nomor 173/DJ-VI/Amdal/95 tanggal 28 Agustus 1995 dan Keputusan Komite Pusat Amdal Dephut Nomor 229/DJ-VI/Amdal/95 tanggal 15 November 1995. Dari luasan 191.487 Ha tersebut, terdapat areal yang akan diusahakan untuk tanaman pokok seluas ± 97.488 Ha yang di dalamnya terdapat lahan yang merupakan *lowland area* seluas ± 55.847 Ha yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena saat ini *lowland area* tersebut termasuk di dalam tata ruang tanaman pokok yang akan dilakukan kegiatan pengusahaan hutan tanaman, maka untuk areal kegiatan penanaman hutan tanaman tersebut diperlukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang bersifat sebagai tambahan (suplemen) yang akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen AMDAL PT. Adindo Hutani Lestari yang sudah ada.

Tetapi rencana kegiatan penanaman hutan tanaman pada *lowland area* seluas ± 55.847 Ha tersebut selain berdampak positif, diperkirakan juga akan menimbulkan dampak negative terhadap komponen lingkungan hidup di sekitarnya, yakni: komponen fisik-kimia, biologi, social ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa dampak negatif dari suatu proyek yang direncanakan harus diminimasi sekecil mungkin, agar kegiatan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan kualitas lingkungan hidup di sekitar proyek yang direncanakan tidak menurun.

Untuk meminimasi dampak negative tersebut perlu dilakukan studi dengan tujuan : (1) mendapatkan data aktual tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, (2) memperoleh gambaran tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat dan (3) untuk mencoba menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan rencana kegiatan guna mengelola kemungkinan timbulnya dampak. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah setempat dan pihak pemrakarsa, guna meminimasi dampak negatif yang diakibatkan kegiatan proyek.

II. METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan, yaitu kepala desa, tokoh agama, ketua RT, pemuka adat, dan aparat pemerintah yang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak pemrakarsa dan instansi-instansi lain yang terkait seperti Dinas Kehutanan, Bappeda, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa di wilayah studi.

Komponen sosial ekonomi yang diteliti meliputi : (1) ekonomi rumah tangga, yang mencakup tingkat pendapatan dan pola nafkah ganda, (2) ekonomi sumberdaya alam, meliputi: pola pemilikan dan penguasaan lahan, pola penggunaan lahan, dan nilai lahan, (3) perekonomian lokal dan regional, meliputi: jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal, fasilitas umum, perhubungan dan komunikasi, serta aksesibilitas wilayah. Sedangkan komponen sosial budaya meliputi : (1) adat istiadat dan nilai budaya, (2) proses/interaksi sosial, (3) pranata social/kelembagaan masyarakat, (4) persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana kegiatan.

Selain data sekunder, data primer diperoleh melalui survai sampel/wawancara dengan responden sebanyak 10% dari jumlah kepala keluarga yang ditetapkan berdasarkan strata yang ada pada masing-masing desa yang diperkirakan akan mendapatkan dampak negatif maupun dampak positif dari proyek.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sosial ekonomi untuk tingkat pendapatan ditabulasikan dan dianalisis dengan rumus sebagai berikut :

1) Tingkat Pendapatan

- (a) Tingkat pendapatan sebagai salah satu indikator ekonomi rumah-tangga dianalisis dari sisi penerimaan :

$$I = TR \quad \dots 5)$$

Keterangan :

I = Pendapatan (*Income*)

TR = Total penerimaan (*Total Revenue*)

- (b) Tingkat pendapatan sebagai salah satu indikator ekonomi rumah-tangga dianalisis dari sisi pengeluaran :

$$I = c - i + s \quad \dots 6)$$

Keterangan :

I = Pendapatan (*income*)

c = Konsumsi (*consumption*)

i = Investasi (*investment*)

s = Tabungan (*saving*)

2) Rata-rata Pendapatan /Pendapatan perkapita (Y)

$$Y = \frac{Y}{A} \quad \dots 7)$$

Keterangan :

Y = Total pendapatan

A = Jumlah tanggungan keluarga

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi

1. Ekonomi rumah tangga

Pendapatan per kapita penduduk merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan yang mendekati kebenaran, maka dilakukan pendekatan pengeluaran yang justru lebih akurat. Karena pada kenyataan di lapangan banyak responden yang tidak dapat mengungkapkan dengan benar tingkat pendapatannya.

Rata-rata pendapatan per kapita masyarakat di wilayah studi disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Penduduk Per-Rumah Tangga/ Bulan di Wilayah Studi (Berdasarkan Jawaban Responden 2011)

Desa	Rata-Rata Pendapatan Sesuai Desa (Rp)				Rata-rata jumlah jiwa/KK
	Pendapatan Minimum Perbulan	Pendapatan Maksimum Perbulan	Rata-rata Pendapatan Perbulan	Rata-rata Pendapatan Perkapita Pertahun	
Sesayap	700.000	1.800.000	1.242.307	3.154.065	5
Sengkong	600.000	2.900.000	1.466.666	4.331.111	5
Buang Baru	600.000	1.300.000	985.714	3.111.428	5,4
Sepala Dalung	400.000	2.700.000	1.408.333	2.996.666	6,3
Seludau	1.250.000	1.750.000	1.537.500	4.704.166	5
Tetaban	500.000	1.700.000	1.031.250	2.717.500	4,9
Kunyt	600.000	1.900.000	1.190.909	2.880.909	5,3
Kekayap	700.000	1.200.000	944.444	2.024.126	5,9
Pembeliangan	600.000	3.300.000	2.065.000	6.223.333	4,5
Atap	1.000.000	3.700.000	2.116.666	7.496.666	3,4
Kalampising	900.000	3.000.000	1.950.000	5.052.000	5
Rata-rata Pendapatan di Wilayah Studi	713.636	2.295.455	1.448.981	4.062.906	4,05

Sumber : Data Primer, 2011

Pada level ekonomi rumah tangga berdasarkan data hasil survei sampel dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan per kapita per tahun di wilayah studi sebesar Rp. 4.062.906,- dengan jumlah jiwa rata-rata 4 orang per rumah tangga. Dengan asumsi bahwa harga beras di wilayah studi sebesar Rp. 10.000,- per kg, maka pendapatan tersebut setara dengan 406.29 kg beras per kapita per tahun. Berdasarkan kriteria Sayogyo (1977), pendapatan ini berada di atas garis kemiskinan, karena masih di atas 320 kg per kapita per tahun. Artinya, untuk level ekonomi rumah tangga, secara umum penduduk di wilayah studi pada tahun 2011 tidak tergolong miskin.

Data mengenai pola nafkah ganda, penduduk di Desa wilayah studi disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pola Nafkah Ganda Penduduk Secara Umum di Wilayah Studi (Berdasarkan Jawaban Responden 2011)

Desa	Pekerjaan Pokok	Pola Nafkah Ganda (Jenis Usaha Sampingan)
Sesayap	Petani	Tukang bangunan, jualan sembako dan bekerja sebagai nelayan.
Sengkong	Nelayan	Bertani atau berkebun
Buang Baru	Petani	Tukang bangunan, jasa transportasi, wiraswasta (bekerja serabutan), nelayan, dan warung sembako,
Sepala Dalung	Nelayan, PNS, Pedagang dan petani	Bekerja serabutan, dan bekerja sebagai tukang.
Seludau	Petani	Bekerja di sektor swasta
Tetaban	Petani , tukang	Petani kebun
Kunyit	Petani , dan PNS	Petani kebun dan nelayan,
Kekayap	Petani	Nelayan
Pembeliangan	Pedagang, pekebun, dan tukang	Tukang cuci, nelayan, dan buka warung kedai
Atap	Petani , PNS, toko	Nelayan dan buka warung sembako.
Kalampising	Petani	Nelayan

Sumber : Data Primer, 2011

Dari table 2 di atas tergambar bahwa pola nafkah ganda penduduk di Desa wilayah studi pada umumnya selain mengandalkan pada sumber pendapatan dari pekerjaan pokok, mereka juga memiliki sumber pendapatan lain yang cukup bervariasi, seperti bekerja sebagai tukang bangunan, jualan sembako dan bekerja sampingan sebagai nelayan, jasa transportasi, dan ada juga yang bekerja sampingan sebagai tukang cuci.

2. Ekonomi sumberdaya alam

Sumberdaya alam yang sangat penting dan bernilai bagi penduduk adalah lahan, karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari lahan, yaitu sebagai peladang. Lahan-lahan tersebut umumnya belum memiliki surat (sertifikat). Lahan untuk berladang maupun untuk tempat tinggal (rumah dan pekarangan) umumnya mereka kuasai dengan cara membuka hutan. Dalam batas wilayah desa, lahan umumnya dikuasai oleh penduduk desa setempat. Namun ladang mereka ada juga yang jaraknya relatif jauh dari desa, mengingat mereka umumnya melakukan perladangan dengan sistem berpindah-pindah, sehingga memerlukan lahan yang cukup luas, dan jauh dari desa.

Data mengenai nilai lahan di wilayah studi sifatnya sangat kualitatif, karena data kuantitatif (nilai moneter) sulit didapat, mengingat tanah di wilayah studi sampai saat ini (saat dilakukan survei) belum pernah dijual-belikan (belum ada pasarnya). Namun secara sosial, tanah di wilayah studi sangat bernilai bagi masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk di wilayah studi bermatapencaharian sebagai peladang berpindah yang memerlukan banyak tanah, sehingga hidup mereka sangat tergantung pada tanah.

3. Perekonomian lokal dan regional

Parameter perekonomian lokal dan regional meliputi penyerapan tenaga kerja, jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aksesibilitas wilayah.

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Dampak kehadiran suatu perusahaan, diharapkan salah satunya dapat mengurangi pengangguran. Dari informasi yang terkumpul tergambar jumlah tenaga kerja yang akan terserap di UPHHK-HT PT. Adindo Hutani Lestari Di *Lowland Area*, untuk karyawan borongan/harian untuk posisi/jabatan bagian *plantation* dan *harvesting* (penanaman dan pemanenan), total sebanyak 9.404 orang pekerja/karyawan, yang sebagian besar (>60%) akan diambil dari penduduk lokal/disekitar lokasi kegiatan.

b. Jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal

Mengenai jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal di wilayah studi disajikan pada Tabel 3 berikut:

Jenis dan aktivitas ekonomi non formal yang terdapat di wilayah studi sampai saat pada umumnya sudah cukup bervariasi, seperti warung/kios, warung makan/kedai minum, dan KUD/KSP

Mengenai jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal di wilayah studi disajikan pada **Tabel 3** berikut:

Tabel 3.. Jenis dan Jumlah Aktivitas Ekonomi Non Formal Di Wilayah Studi.

Desa	Toko	Kios sembako	Koperasi	Warung kopi
Sesayap	-	15	2	2
Sengkong	-	3	1	-
Buang Baru	-	3	1	-
Sepala Dalung	1	5	1	2
Seludau	-	1	1	3
Tetaban	-	2	1	2
Kunyt	1	3	1	1
Kekayap	1	3	1	1
Pembeliangan	6	35	4	3
Atap	6	30	1	3
Kalampising	-	2	-	-

Sumber : Informasi Perangkat Desa Masing-masing Di Wilayah Studi, 2011

c. Fasilitas umum dan fasilitas sosial

Mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah studi sudah cukup memadai, oleh karena itu dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu faktor pendukung tingginya mobilitas sosial. Berdasarkan hasil survey sampel tergambar bahwa prasarana penunjang perekonomian yang ada di desa wilayah studi pada umumnya dengan menggunakan perahu motor (186 unit) sebagai sarana transportasi sungai dan sepeda motor (993 unit) serta mobil (31 unit) sebagai sarana transportasi darat.

d. Aksesibilitas Wilayah.

Jalur transportasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa wilayah studi pada umumnya menggunakan sarana transportasi air, baik yang menghubungkan antara Desa yang satu dengan Desa lainnya.

Untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten pada setiap Desa dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi air dengan jarak waktu tempuh dari Desa-Desa wilayah

studi ke Ibukota Kota Kabupaten relatif tergolong cepat karena dapat dilakukan setiap saat.

Kondisi Sosial Budaya

1. Adat-istiadat dan budaya

Adat istiadat yang berlaku di Desa sekitar wilayah studi adalah adat suku Dayak. Dalam hal kehidupan bermasyarakat peran tokoh adat cukup dominan dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan hukum adat, dimana masyarakat setempat masih cukup menjunjung tinggi nilai adat yang diterapkan terutama dalam hal kegiatan: perkawinan, kematian, kesenian adat, dan yang berhubungan dengan masalah lahan .

Selanjutnya, mengenai hukum adat masih tetap dipertahankan dan bagi mereka yang melanggar akan dikenakan denda adat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat Desa tetangga. Tata nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, sebelumnya telah diatur dalam keputusan Dewan adat.

Pengobatan tradisional (Belian) sudah jarang dilakukan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang mereka anut. Mengenai hal-hal yang merupakan larangan telah diatur bersama oleh dewan adat, dilarang keras minuman keras, pergaulan intim sebelum menikah.

Perubahan sosial terutama berkenaan dengan gaya hidup masyarakat terlihat cukup deras disebabkan arus informasi dan transportasi yang masuk ke daerah ini. Perubahan-perubahan tersebut termasuk pola perilaku dan gaya hidup, seperti cara berpakaian para kaum muda, cara-cara bermusyawarah, perubahan pola pikir warga masyarakat. Kontrol social atas perilaku masyarakat dalam hal hubungan social budaya dan kekeluargaan/kekerabatan dirasakan masih sangat kuat melalui nilai-nilai/norma hukum adat.

Disamping itu terdapat pula hal-hal yang dianggap tabu untuk dilakukan masyarakat seperti menebang pohon benggeris, bengkirai, yang sebenarnya juga mempunyai nilai ekologis dan ekonomis.

2. Proses/interaksi sosial

Salah satu indikator proses atau interaksi sosial yang ditelaah dalam penelitian ini adalah kerjasama antar warga masyarakat. Berdasarkan survei sampel diketahui bahwa pada umumnya masyarakat cukup terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai pihak meskipun terdapat perbedaan suku ataupun agama. Hal itu menunjukkan keadaan iklim sosial yang cukup baik.

Proses interaksi / kerjasama di daerah penelitian tergambar dari bentuk-bentuk gotong-royong yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dari hasil survei sampel diketahui bahwa kegiatan gotong-royong penduduk kampung masih baik, terutama kegiatan gotong royong yang menyangkut kepentingan umum

kelompok maupun kepentingan pribadi. Kerjasama untuk kepentingan umum adalah gotong-royong untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan desa. Adapun kerjasama yang menyangkut kepentingan kelompok ataupun pribadi, misalnya terjadi dalam mencari nafkah dan kegiatan keagamaan. Kerjasama juga terjadi antara warga setempat dengan pihak lain/pihak luar, misalnya perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Kerjasama dilakukan tanpa melihat perbedaan etnis maupun agama. Motivasi yang mendasari kerjasama itu di samping alasan ekonomi adalah motivasi keagamaan dan motivasi ke daerahan.

Indikator lainnya dari proses/interaksi sosial yang dikaji adalah konflik sosial. Mengenai potensi konflik dalam kehidupan masyarakat di wilayah studi memang ditemukan pilihan responden yang menyatakan kadang-kadang muncul konflik. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah/kekeluargaan. Adapun sumber konflik yang muncul adalah masalah lahan, kecemburuan social, nilai budaya luar, minuman keras, dan hubungan muda-mudi.

Proses sosial yang lebih jauh dalam kehidupan bermasyarakat ditandai dengan adanya asimilasi. Di lokasi wilayah studi juga telah terjadi asimilasi antara lain melalui perkawinan antar suku yang telah lama menetap di daerah itu. Mengenai latar belakang yang mendasari terjadinya proses asimilasi pada umumnya adalah bahwa faktor agama, perilaku dan saling mencintai sangat dominan yang mewarnai pendapat responden, sementara faktor persamaan suku dan pekerjaan kurang menentukan dalam proses asimilasi di daerah penelitian pada umumnya.

3. Kelembagaan sosial

Pranata sosial ini meliputi kelembagaan bi dang ekonomi, pendidikan, agama, sosial kemasyarakatan, lembaga Desa, dan lembaga adat.

Secara administratif lembaga formal yang berperan di pedesaan adalah RT (Rukun Tetangga) dan Kepala Desa. Lembaga lain yang berperan di Desa adalah Badan Perwakilan Desa (BPK) yang mempunyai fungsi strategis untuk menangkap dan mengungkapkan aspirasi, sebagai bentuk demokratisasi di pedesaan. Lembaga ini selain berperan sebagai badan perencanaan di Desa juga berusaha menggalang dan meningkatkan kegiatan gotong-royong masyarakat di Desa.

Sedangkan kelembagaan pemuda yang ada dan berfungsi adalah Karang Taruna dan perkumpulan olah raga yang merupakan wadah kaum muda untuk beAdindo Hutani Lestariatif dan berorganisasi. Adapun lembaga-lembaga *social religius* lainnya seperti kelompok pengajian bagi yang beragama Islam dan kebaktian bagi yang beragama Katholik telah berkembang cukup baik.

4. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana kegiatan PT. Adindo Hutani Lestari

Sebagian besar responden (96,46%) telah mengetahui keberadaan PT. Adindo Hutani Lestari. Mereka mengaku mengetahuinya dari pihak perusahaan melalui sosialisasi. Hanya sebagian kecil responden (3,54%) yang menyatakan

belum tahu tentang keberadaan PT. Adindo Hutani Lestari. Sebagian besar responden (93,81%) menyatakan “setuju”, 0,88% responden “tidak ada pendapat” dan “ragu-ragu”, dan hanya 5,31% responden yang menyatakan tidak setuju.

Harapan responden akan hadirnya perusahaan tergambar bahwa perusahaan akan menguntungkan dalam hal membantu pemerintah dan kontribusi pembangunan daerah, kemudian disusul dapat membuka peluang kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun tanggapan beberapa responden yang menyatakan tidak setuju pada umumnya mereka menganggap kehadiran perusahaan akan menimbulkan kerusakan hutan, bencana banjir, dan kemungkinan akan meningkatkan potensi konflik.

Hasil survei sampel tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil diskusi bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa serta masyarakat, yang menggambarkan bahwa pada umumnya masyarakat mendukung dan mengharapkan agar rencana kegiatan pengelolaan hutan kayu oleh PT. Adindo Hutani Lestari di wilayah Desa mereka tetap dilanjutkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat cukup baik (tidak tergolong miskin), sebagian dari mereka sudah memiliki kebiasaan menabung, baik dalam bentuk uang maupun barang. Pada umumnya penduduk selain mengandalkan pada sumber pendapatan dari pekerjaan pokok, mereka juga memiliki sumber pendapatan lain yang cukup bervariasi, seperti bekerja sebagai tukang bangunan, jualan sembako dan bekerja sampingan sebagai nelayan, jasa transportasi, dan ada juga yang bekerja sampingan sebagai tukang cuci.
2. Rata-rata kepala keluarga memiliki lahan seluas antara 2 Ha sampai 8 Ha, status lahan pada umumnya tidak disertai surat bukti apapun. Nilai lahan di wilayah studi bersifat kualitatif, karena belum pernah dijual-belikan. Namun secara sosial, tanah di wilayah studi sangat bernilai bagi masyarakat, karena sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan berkebun, sehingga hidup mereka sangat tergantung pada tanah. Pola pemanfaatan sumberdaya alam adalah untuk mendirikan rumah, sebagai sarana transportasi dan sumber mencari nafkah.
3. Kegiatan perekonomian lokal yang terdapat di sekitar wilayah studi pada umumnya sudah cukup bervariasi, seperti warung sembako, kios, warung makan/kedai minum, dan KUD/KSP. Prasarana perekonomian yang ada pada umumnya selain menggunakan mobil sebagai sarana transportasi darat, mereka juga menggunakan perahu motor sebagai sarana transportasi sungai. Untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten pada setiap Desa dapat ditempuh dengan

menggunakan transportasi air dengan jarak waktu tempuh dari Desa-Desa wilayah studi ke Kota Kabupaten relatif tergolong cepat karena dapat dilakukan setiap saat.

4. Adat istiadat yang berlaku di Desa sekitar wilayah studi adalah adat suku Dayak. Dalam hal kehidupan bermasyarakat peran tokoh adat cukup dominan dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan hukum adat, dimana masyarakat setempat masih cukup menjunjung tinggi nilai adat yang diterapkan terutama dalam hal kegiatan: perkawinan, kematian, kesenian adat, dan yang berhubungan dengan masalah lahan.
5. Walaupun penduduk di lokasi penelitian sebagian berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa dan agama yang berbeda, namun jarang terjadi perselisihan yang mengarah kepada unsur sara. Proses asimilasi telah terjadi diantara mereka, antara lain melalui pernikahan antar suku.
6. Lembaga-lembaga sosial yang ada di lokasi penelitian disamping Desa antara lain adalah Rukun Tetangga (RT), Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa, Pertahanan Sipil (Hansip), Karang Taruna, Koperasi Unit Desa, Perkumpulan olah raga, PKK, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan lembaga keagamaan.
7. Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan PT. Adindo Hutani Lestari adalah sangat positif. Masyarakat menilai bahwa kehadiran perusahaan tersebut akan memberikan manfaat bagi mereka. Mereka berharap agar kegiatan pengelolaan hutan kayu oleh PT. Adindo Hutani Lestari segera terealisasi. Beberapa harapan dari masyarakat yang muncul antara lain agar perusahaan memberikan bantuan di bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pertanian, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Saran-saran

1. Rencana kegiatan IUPHHK-HA oleh PT. Adindo Hutani Lestari di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, selain berdampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitarnya termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Untuk itu dalam penanganan dampak akan lebih tepat bila dilakukan terhadap sumber-sumber penyebab timbulnya dampak, seperti pada saat kegiatan ijin koridor, rekrutman tenaga kerja, dan tingkah laku karyawan/buruh pendatang.
2. Kegiatan ijin koridor lahan untuk PT. Adindo Hutani Lestari seluas 191.487 Ha diperkirakan akan menimbulkan dampak negative, yakni semakin berkurangnya luasan lahan dan berkurangnya keragaman sumber matapencaharian masyarakat. Agar taraf hidup masyarakat sekitar tetap terjaga dan bahkan meningkat, maka perlu dilakukan bimbingan teknis budidaya berbagai jenis tanaman, perikanan, peternakan dan industri rumah tangga sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

3. Dalam proses penerimaan karyawan/buruh, hendaknya lebih memprioritaskan pada masyarakat setempat selama memenuhi spesifikasi keahlian yang dipersyaratkan, sehingga diharapkan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
4. Perlu adanya pembinaan terhadap karyawan/buruh terutama pendatang, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan adat budaya masyarakat setempat sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan/norma yang berlaku di masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
5. Pengusaha perlu menumbuhkan peran serta masyarakat pada kegiatan perdagangan, jasa angkutan, dan memberikan bantuan sosial, serta menindak tegas terhadap karyawan/buruh yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anonim. 2000. *Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan AMDAL Hak Pengusahaan Hutan Tanaman*. Komdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Poedjawijatna, 1987. *Manusia dengan Alamnya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sajogyo 1982. *Bunga Rampai Perekonomiaan Desa*. Yayasan Agro-ekonomi, IPB, Bogor.
- Sajogyo 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSP-IPB, Bogor.
- Sajogyo 1989. *Sosiologi Pedesaan*. Penerbit UGM, Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 1989. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. UGM-Press, Yogyakarta.
- Tjitrajaya, I & A.P. Vayda. 1990. *Mangkaji Hubungan Timbal Balik antara Prilaku Manusia dan Lingkungan*. LIPI, Jakarta.
- Wirosuhardjo, K. 1991. *Dasar-Dasar Demografi*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.